

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KAB. DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Jefri Maulana
NPM : 1905170179
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : JEFRI MAULANA
NPM : 1905170179
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II


AHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA.


M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.

Pembimbing


Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si, Ak, CA.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.


Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : JEFRI MAULANA
N P M : 1905170179
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

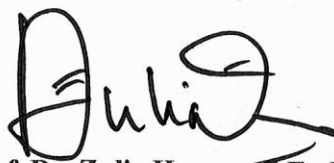


(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Jefri Maulana
NPM : 1905170179
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala sari. S.E., M.Si., Ak,CA
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	perbaikan deskripsi dan secara dengan konsep konsep pembahasan secara dgn deskripsi masalah dan dit di pabal yg pengant	12/0 23	3/f
Bab 5	perbaikan konsep & sum	12/0 23	3/f
Daftar Pustaka	ditas dosen dgn umen mn 5 ebook	12/0 23	3/f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si

Medan, Agustus 2023
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Dr. Eka Nurmala sari. S.E., M.Si., Ak,CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Maulana
NPM : 1905170179
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Jefri maulana

ABSTRAK

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Jefri Maulana

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara kepada pihak perusahaan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Penerapan akuntabilitas terkait dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwasannya telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Penerapan transparansi terkait dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwasannya belum sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan pada kecamatan percut sei tuan masih cukup efektif terjadi defisit anggaran yang terlalu besar karena belanja daerah lebih tinggi dari pendapatannya

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

Analysis of Accountability and Transparency in Improving Financial Management Performance in Percut Sei Tuan District, Kab. Deli Serdang

Jefri Maulana

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

This research is a study conducted to determine Accountability and Transparency in Improving Financial Management Performance in Percut Sei Tuan District, Kab. Deli Serdang. This study uses a descriptive approach with primary data sources obtained from documentation studies and interviews with the company. The analysis carried out in this study used descriptive statistical analysis.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of accountability related to administration, reporting and accountability can be concluded that it is in accordance with Permendagri 113 of 2014. The application of transparency related to administration, reporting and accountability can be concluded that it is not in accordance with Permendagri 113 of 2014.

The level of effectiveness of financial management in Percut Sei Tuan sub-district is still quite effective, there is a budget deficit that is too large because regional spending is higher than income

Keywords: Accountability, Transparency and Financial Management Performance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WarahmatullahWabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam kepada junjungan nabi besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti, amin ya robbal'alam.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Didalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”**.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tidak pernah ada henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang selalu memberikan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda Iswanto dan Ibunda Siti Aflah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan bimbingan, nasehat, dan doa sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri., S.E., MM.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan., S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof, Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr.Eka Nurmala sari SE., M.Si, Ak,CA selaku Dosen Pembimbing proposal yang telah memberikan masukan dan bantuan dengan hati yang ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Elizar SSinambela, S,E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama proses perkuliahan berlangsung
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan selama dibangku perkuliahan.

10. Kepada Kakak dan abang saya tercinta Kak Meridarti, Kak Nurhavivah dan bang Jeli Nardi beserta keponakan tercinta yang selalu memberi semangat dorongan dan financial kepada penulis
11. Kepada pada sahabat-sahabat saya Fahmi yasin, Agung Bimantoro, Suhendrik, Karina sri wandani, Lisda Arinanda, Romi Suhendra, Fauziah Hendriani, Azmi Gita Sari, Dita Aulia, Dahlia, Muhammad Fahri, Annisah Rahmah, dan Roy Pramudya yang sudah menemani masa-masa indah di tanah perantauan.
12. Buat seluruh Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis terkhusus P.A 2021/2022.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap proposal ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasamasa yang akan datang, Aamiin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, 2023

Penulis,

Jefri Maulana
1905170179

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSYTACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Akuntabilitas.....	11
2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas	11
2.1.1.2. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas.....	12
2.1.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas	12
2.1.1.4. Indikator Akuntabilitas	13
2.1.2. Transparansi	14
2.1.2.1. Pengertian Transparansi.....	14
2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Transparansi.....	14

2.1.2.3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi	15
2.1.2.4.	Indikator Transparan	16
2.1.3.	Kinerja Pengelolaan Keuangan	16
2.1.3.1.	Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan.....	16
2.1.3.2.	Manfaat Kinerja Pengelolaan Keuangan	18
2.1.3.3.	Fakor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan.....	19
2.1.3.4.	Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan	20
2.2.	Penelitian Terdahulu	24
2.3.	Kerangka Berfikir	32
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Pendekatan Penelitian.....	35
3.2	Defenisi Operasional	35
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.4	Jenis dan Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	38
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1.	Deskripsi Data.....	39
4.1.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.2.	Pengelolaan Anggaran Keuangan Kecamatan Percut Sei Tuan	41
4.1.3.	Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan	

Percut Sei Tuan	43
4.1.3.1. Penerapan Akuntabilitas dengan Indikator Standar Operasional Pengelolaan Anggaran.....	43
4.1.3.2. Penerapan Akuntabilitas dengan Indikator Pertanggungjawaban.....	46
4.1.4. Penerapan Transparansi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Percut Sei Tuan	48
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1. Penerapan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan	50
4.2.1 Penerapan Transparansi dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan.....	51
4.2.2 Penerapan Transparansi dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan	53
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran.....	54
5.3. Keterbatasan Penelitian	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Pendidikan Aparatur Kecamatan Percut Sei Tuan	4
Tabel 2.1.	Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Percut Sei Tuan.....	6
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3.2.	Daftar kisi-kisi wawancara.....	38
Tabel 4.1.	Daftar Desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan	40
Tabel 4.2.	Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Percut Sei Tuan.....	41
Tabel 4.2.	Akuntabilitas terkait dengan Penatausahaan.....	43
Tabel 4.3.	Akuntabilitas terkait dengan Pelaporan	45
Tabel 4.4.	Akuntabilitas terkait dengan Pertanggung Jawaban	46
Tabel 4.4.	Transparansi terkait dengan Kualitas Informasi dan Kebebasan Arus Informasi	48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”(Damin & Mustaqim, 2021). Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada masyarakat seperti halnya dalam penyampaian kinerja pengelolaan keuangan diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Julita & Abdullah, 2020).

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Lombo et al., 2022). Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki keterkaitan satu sama lain. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dan transparansi menunjuk pada kebebasan untuk memperoleh informasi. (Putri & Lestari, 2019) mendefinisikan Akuntabilitas adalah standar dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat. Sedangkan transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga

memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan.

Uraian di atas memberikan arahan kepada kita bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya adalah: pertama, dimensi kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan secara terbuka (transparan) menunjukkan apa yang dilakukan dalam bentuk laporan atau penjelasan, yang kesemuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat. Kedua, berupa hak rakyat untuk memperoleh informasi berupa pertanggungjawabanyang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dan merasa puas dengan segala kebijakan pemerintah, karena setiap tahapan proses penyelenggaraan pemerintahan selalu menginformasikan kepada publik dan sebaliknya, masyarakat juga berhak melakukan kontrol. untuk setiap proses.

Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dipisahkan antara apa yang dilakukan pemerintah dengan kepentingan atau hak-hak rakyat di dalamnya. Ketika pemerintah tidak melaporkan atau tidak menginformasikan kepada publik apa yang dilakukannya, atau tidak memuaskan masyarakat, atau tidak dapat mengakomodir kepentingan rakyat sehingga mengecewakan, maka secara otomatis berarti telah melanggar hak-hak rakyat. Upaya untuk memperbaiki di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan oleh pemerintah daerah melalui internet, surat kabar, atau cara lain belum menjadikan hal yang umum bagi sebagian daerah terutama pada instansi kecamatan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang

tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para penggunanya.

Namun ada beberapa hal yang menghambat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah atau perangkat daerah seperti target penggunaan dana yang belum terealisasi dengan baik, dikarenakan sumber daya manusia yang kurang profesional dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah seperti terlambat memasukkan bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan (Anwar & Jatmiko, 2014).

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Kecamatan Percut Sei Tuan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/Sederajat	5
S1 Akuntansi	-
Sarjana Lainnya	11

Sumber : Sekretaris Camat Percut Sei Tuan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Percut Sei Tuan masih diisi kebanyakan lulusan SMA dan tidak ada lulusan dari Akuntansi, yang menunjukkan masih rendahnya sumber daya manusia, kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor Aparatur kecamatan yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana. Kurang pahamnya aparatur Pemerintahan Daerah tersebut berimbas kepada terjadinya kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapat informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan transparansi artinya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan

efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja (Lestari et al., 2020).

Kinerja keuangan suatu daerah dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi daerah. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Silaban et al., 2022)

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas pengguna akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Tuntutan dalam pengelolaan dilakukan pertanggungjawaban dan transparansi atas menyajikan, menyusun, melaporkan dan pemberian informasi kepada publik sesuai pemenuhan hak-hak publik. Kewajiban pemerintah dalam menyusun laporan keuangan diwujudkan sebagai akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara.

Kewajiban seluruh instansi ini baik di pemerinthan pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan transparan dalam mengelola keuangan negara.

Pengelolaan Keuangan Kecamatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan Kecamatan harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun laporan realisasi anggaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Percut Sei Tuan

Keterangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Tingkat Efektifitas
Pendapatan Daerah	720.000.000	612.000.000	85,00%
Belanja Daerah	(10.213.339.618)	(9.142.256.413)	89,51%
Surplus/Defisit	(9.493.339.618)	(8.530.256.413)	89,85%
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Tingkat Efektifitas
Pendapatan Daerah	801.413.550	739.730.800	92,30%
Belanja Daerah	(12.330.314.563)	(11.628.091.216)	94,30%
Surplus/Defisit	(11.528.901.013)	(10.888.360.416)	94,44%
	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Tingkat Efektifitas
Pendapatan Daerah	840.000.000	703.000.000	83,09%
Belanja Daerah	(14.392.514.380)	(11.317.127.472)	78,63%
Surplus/Defisit	(13.552.514.380)	(10.614.119.252)	78,32%

Sumber : LRA Kecamatan (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat efektifitas pendapatan daerah dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan berada pada nilai 83,09%, tingkat efektifitas tersebut masih termasuk efektif namun pada seluruh tahun anggaran terjadi defisit anggaran yang terlalu besar karena belanja daerah lebih tinggi dari pendapatannya. Hal ini menunjukkan fenomena terkait dengan tingkat partisipatif yang rendah pada kinerja pengelolaan keuangan kecamatan percut sei tuan.

Pemerintah daerah juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh peraturan pemerintah

yang mengikat seluruh pemerintah daerah khususnya kecamatan dan pemerintah pusat berupa undang-undang, oleh karena itu setiap kecamatan juga harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Keterbukaan adalah data atau informasi untuk 4 publik yang dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi juga dapat menunjukkan ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat luas untuk mengetahui proses pelaksanaan, persiapan, dan hasil yang telah dicapai melalui suatu kebijakan publik. Transparansi juga dapat diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat luas antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, efisien dan efektif bagi berkembangnya aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat

Kinerja Pengelolaan keuangan Kecamatan yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu kecamatan. Perkembangan suatu daerah yang baik dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan suatu kecamatan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun kecamatan.

Pemerintah kecamatan harus dapat memanfaatkan dana peruntukkannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki Camat dan perangkat kecamatan. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana

kecamatan yang baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah bahwa :

1. Terjadinya defisit anggaran di tahun 2020, 2021 dan 2022
2. Tingkat pendidikan aparatur kecamatan yang masih standard sekolah menengah
3. Sistem informasi dan komunikasi terkait Wabset kecamatan percut sei tuan yang masih belum aktif dalam mendukung keterbukaan informasi.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini membatasi dengan menganalisis Pengelolaan Keuangan melalui Akuntabilitas dan Transparansi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan?
- b. Bagaimanakah Penerapan Akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan?
- c. Bagaimanakah Penerapan Transparansi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Transparansi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan Penerapan Akuntabilitas dan tranparansi alam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.

b. Manfaat Bagi Kecamatan Percut Sei tuan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama Kecamatan Percut Sei tuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas

2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam (Fathah, 2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fajar, 2020). Sementara itu menurut (Garung & Ga, 2020) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

2.1.1.2. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu (Mardiasmo et al., 2008) :

1. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.1.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas

Sementara itu (Garung & Ga, 2020) menyatakan terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat macam-macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas manajerial merupakan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

2.1.1.4. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas mengacu pada yaitu (Ramadhani, 2021):

1. Standar operasional pengelolaan anggaran.

SOP merupakan penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

Usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator dari akuntabilitas

yaitu memperhatikan aturan-aturan serta SOP yang telah ditetapkan serta memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak yang berwenang.

2.1.2. Transparansi

2.1.2.1. Pengertian Transparansi

Menurut (Garung & Ga, 2020) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu (Ramadhani, 2021) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman et al., 2016).

Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Transparansi

Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. (Mardiasmo et al., 2008) menyatakan manfaat transparansi yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan integritas suatu organisasi dan dapat memberikan

kenyamanan bagi para pengguna informasi.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh skakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya tujuan.

2.1.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi

Sedangkan menurut (Mardiasmo et al., 2008) menyatakan dimensi transparansi adalah:

1. *Informativeness* (informatif) yaitu memberikan semua keterangan baik itu berupa data atau informasi kepada *stakeholders* secara tepat sesuai dengan fakta-fakta.
2. *Disclosure* (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepadamasyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa

prinsip transparansi haruslah memiliki minimal 2 karakteristik yang ada yaitu informatif dan pengungkapan. Informatif berarti informasi yang diungkapkan haruslah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diakses, serta dapat diperbandingkan. Sedangkan pengungkapan berarti informasi yang diungkapkan kepada publik haruslah meliputi Kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta rencana dan hasil evaluasi kegiatan.

2.1.2.4. Indikator Transparan

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada (Harjono & Zulkarnaen, 2017) yang diukur dalam dimensi keterbukaan sehingga dapat diawasi dan diketahui, indikatornya :

1. Kualitas informasi pengelolaan anggaran

Menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu.

2. Kebebasan arus informasi.

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.3. Kinerja Pengelolaan Keuangan

2.1.3.1. Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Mengelola keuangan merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dimana seseorang harus mengelola keuangan dengan baik agar dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, dapat memenuhi kebutuhan hidup serta tidak terjebak dalam kesulitan keuangan. Menurut (Putri & Lestari, 2019) menyatakan bahwa :

“Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan manajemen keuangan pribadi yang merupakan proses seorang individu memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun dan sistematis”.

Menurut (Yushita, 2017) dalam melakukan pengelolaan keuangan haruslah ada perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Media pencapaian tujuan tersebut dapat melalui tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka tidak akan terjebak pada perilaku berkeinginan yang tidak terbatas.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasukkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Sinambela et al., 2018) Kemudian dilanjutkan dengan jurnal (Yushita, 2017) pengelolaan keuangan pribadi juga menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Nalarnya adalah kekuatan dari prioritas (*the power of priority*) berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola uangnya.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, mengelola, merencanakan, dan menyimpan keuangannya sehari-hari.

2.1.3.2. Manfaat Kinerja Pengelolaan Keuangan

Terdapat beberapa elemen yang termasuk dalam pengelolaan keuangan yang efektif, seperti pengaturan anggaran dan pengeluaran, serta menilai perlunya dana cadangan untuk kondisi darurat dan tabungan masa depan, yaitu dana pensiun, asuransi, dan investasi dalam jangka waktu yang wajar. Tugas utama manajemen uang adalah proses penganggaran. Anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode yang sama. Perilaku manajemen keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dana keuangan sehari-hari, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan keuangan. Dalam praktiknya manfaat perilaku pengelolaan keuangan terbagi menjadi tiga hal utama yaitu : (Gunawan et al., 2020):

- a. Konsumsi, yakni pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai barang dan jasa (kecuali pembelian untuk rumah baru).
- b. Tabungan, yaitu bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh sebuah rumah tangga pada suatu periode tertentu.
- c. Investasi, yakni mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa mendatang.

Dengan perilaku manajemen keuangan individu dapat merencanakan dan mengatur dengan lebih baik keuangan yang dimiliki dalam pos-pos pengeluaran yang berbeda-beda dengan proporsi yang seimbang. Setiap individu memiliki perilaku manajemen keuangan yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing individu

(Pulungan, 2017).

Kegagalan dalam mengelola keuangan individu dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang serius tidak hanya untuk orang tersebut tapi juga bagi perusahaan. Beberapa tahun belakangan ini, praktik manajemen keuangan mendapatkan perhatian serius dari berbagai organisasi seperti pemerintah, lembaga keuangan, universitas dan lain. Dalam beberapa studi manajemen keuangan didefinisikan sebagai seperangkat perilaku mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hal-hal yang terlibat dalam bidang tunai, kredit, investasi, asuransi dan pensiun, dan perencanaan perumahan. Manajemen keuangan juga dapat didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan arus kas, kredit, tabungan dan manajemen investasi (Yushita, 2017).

2.1.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan

Menurut (Ida & Dwinta, 2010) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut :

1) Pengetahuan keuangan

Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang masih kurang menjadi alasan utama mengapa masyarakat gagal mengelola keuangan pribadinya.

2) Pengalaman keuangan

Pengalaman keuangan adalah kejadian tentang hal yang berhubungan dengan keuangan yang pernah dialami baik yang sudah lama atau yang baru saja terjadi. Dari pengalaman keuangan dapat digunakan untuk modal dalam mengelola keuangan.

3) Sikap keuangan

Sikap Keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat serta penilaian tentang keuangan. Sikap menunjukkan banyak hal terkait dengan uang, meliputi perlindungan kedudukan sosial dan kepuasan individu. Seseorang membangun sikap terhadap uang berdasarkan pengalaman dan keadaan mereka.

4) Tingkat pendidikan

Dengan pendidikan formal yang memadai, individu akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami pengelolaan keuangan yang baik dan dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan.

Selanjutnya Menurut (Gunawan et al., 2020) empat faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan yaitu :

- 1) *financial quantitative* literacy merupakan kemampuan dan membaca tentang keuangan secara kuantitatif.
- 2) *subjectif numeracy* merupakan preferensi seseorang bekerja dengan angka dan kepercayaan diri.
- 3) *materialism* merupakan seperangkat keyakinan yang terpusat akan pentingnya harta dalam hidup seseorang.
- 4) *impluse comsumptio* merupakan dorongan untuk membeli sesuatu yang tiba-tiba, tanpa ada niat atau rencana, bertindak atas dorongan tanpa mempertimbangkan tujuan jangka panjang atau cita-cita

2.1.3.4. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan

Menurut (Warsono, 2010) adapun indikator kinerja pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut :

1) Penggunaan dana

Cara pengalokasian dana merupakan persoalan agar dapat memenuhi kebutuhan secara benar dan tepat, dari manapun sumber dana yang diperoleh dan dimiliki. Dana dialokasikan harus dilandaskan skala prioritas. Skala prioritas dilihat menurut keperluan yang paling dibutuhkan, tetapi harus tetap diperhatikan presentase pengalokasian dananya agar penggunaan dana tidak semuanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

2) Penentuan sumber dana

Sumber dana dapat bersumber dari orang tua, beasiswa, ataupun donatur. Selain itu juga individu dapat menentukan sumber dana yang didapat dari mana, dengan mampu menentukan sumber dana maka seseorang dapat tahu cara mencari sumber dana alternatif lain sebagai pemasukan untuk dikelola.

3) Manajemen risiko

Seseorang harus memiliki perlindungan (*proteksi*) yang baik agar dapat mengantisipasi kejadian yang tidak terduga seperti kebutuhan mendesak, sakit dan lain sebagainya. Biasanya seseorang melakukan proteksi dengan cara mengikuti asuransi.

Yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah pengelolaan terhadap kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi.

4) Perencanaan masa depan

Perencanaan masa depan sangat diperlukan karena hal ini akan di tuju oleh setiap individu. Dengan perencanaan ini maka anda dapat menganalisa kemungkinan kebutuhan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Dengan

mempersiapkan investasi dari saat ini.

Menurut (Warsono, 2010) ada 10 indikator pengelolaan keuangan yang benar saat usia 16-30an yaitu :

1) Memahami cara membuat anggaran pendapatan dan belanja

Usia 30 tahun merupakan peralihan dari masa dewasa awal yang ditandai dengan kemandirian secara ekonomi, alias lepasnya ketergantungan dari orang tua. Meskipun awalnya tinggal bersama orang tuanya, ada baiknya seseorang belajar untuk mencatat pengeluaran setiap bulan secara jelas. Prinsip dasar pengelolaan keuangan sangat mudah yaitu menyisakan sepertiga dari pendapatan untuk ditabung dan investasi, dan memanfaatkan sisanya untuk kebutuhan harian, termasuk pengeluaran untuk berwisata atau rekreasi.

2) Besar pendapatan daripada pengeluaran

Jika kita sudah memahami cara membuat anggaran dan pengeluaran, maka dampak lanjutannya adalah kita menjadi sadar untuk selalu berusaha membuat pengeluaran lebih kecil dari pendapatan kita. Tantangannya di usia 30 tahun kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Batasan keduanya sangat jelas, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi saat ini yang jika tidak dipenuhi akan mengganggu aktivitas lain, sementara keinginan hanyalah sifatnya tidak mendesak dan umumnya muncul karena mengikuti tren sesaat.

3) Mampu memanfaatkan fasilitas kartu kredit dengan baik

Banyak orang di usia 30 tahun sudah memiliki fasilitas kartu kredit. Pemegang kartu kredit pada dasarnya adalah orang yang dipercaya oleh Bank. Banyak fasilitas yang ditawarkan oleh Bank dan bisa kita manfaatkan sebagai 'pengungkit' kondisi finansial kita. Kartu kredit tetaplah alat bantu pembayaran.

Kita tidak boleh goyah dengan segala bentuk godaan promosi yang ditawarkan oleh Bank penerbit kartu kredit. Perlu diingat bahwa bunga kartu kredit umumnya cukup besar sehingga jika kita tidak waspada, maka kita akan terjebak dalam hutang kartu kredit yang berkepanjangan.

4) Benar dalam memilih tempat berhutang

Jika kita tidak dapat menghindari hutang, maka carilah tempat berhutang yang tidak membebankan bunga. Sesuai urutan, maka tempat berhutang terbaik bisa dimulai dari orang tua, saudara, teman dan jika terpaksa baru kita memilih berhutang ke bank. Pilihlah produk pinjaman dengan bunga terendah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sudah berhasil mendapatkan pinjaman dari pihak lain, satu hal yang paling penting, jangan lupa nyicil.

5) Gaya hidup yang sehat sehat itu mahal

Begitu slogan yang sering kita dengar. Tugas kita adalah memilih gaya hidup sehat dengan makan teratur, memperhatikan asupan gizi, berolahraga dan istirahat yang berkualitas. Jika kita mampu melakukan gaya hidup sehat sejak muda, maka Insya Allah penyakit enggan mampir di usia tua nanti. Keluar dari zona nyaman dan berani mengambil tantangan. Kita memiliki kebebasan untuk memilih apakah menjadi karyawan atau pengusaha atau melakukan keduanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan usaha guna mendapat hasil yang lebih. Kuncinya mau keluar dari zona nyaman dan berani mengambil tantangan.

6) Memiliki beberapa sumber penghasilan

Apapun profesi anda saat ini, jika anda sudah memiliki beberapa sumber penghasilan, itu artinya anda berada di jalur yang benar. Sumber penghasilan ini

bisa beragam, mulai dari hasil aset aktif, surat berharga, usaha, dan lain sebagainya. Pada kondisi ini anda sudah tidak lagi dikhawatirkan dengan kondisi-kondisi buruk seperti usaha bangkrut, karena memiliki beberapa sumber penghasilan yang saling mengamankan.

7) Memahami cara dan metode investasi yang benar.

Investasi tidak sama dengan menabung. Kita harus memahami cara dan metode investasi yang benar. Menyimpan uang di bank, akan terkena resiko inflasi dan mengakibatkan nilai uang kita di masa depan menurun. Maka kita harus belajar memahami instrumen investasi yang tersedia seperti pasar modal, emas, pasar berjangka, properti dan lain sebagainya.

8) Memperhatikan faktor inflasi.

Tahun 2014, inflasi di Indonesia berkisar antara 7-8%. Faktor inflasi inilah yang akan menggerus nilai uang yang kita miliki sehingga menurunkan daya beli kita di masa yang akan datang. Maka pandai-pandailah untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru agar kita memiliki kemampuan untuk mengatasi faktor inflasi setiap waktu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

N O	NAMA PENELITI DAN TAHUN TERBIT	JUDUL, NAMA JURNAL, HALAMAN, WEB	HASIL PENELITIAN
1.	Penulis Korespondensi (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh, Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol - Jurnal Pembangunan Daerah 1(2) (2019) 	Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol.
2.	RANO ASOKA, S.E.,M.Si STIE Rahmaniyah Sekayu	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin 	Dalam hal transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan dengan baik, hal itu ditunjukkan dengan adanya laporan SAKIP
3.	Hari Eka Setiyawan ¹ ; Muhammad Safri (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat 	Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. 2. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo

		<p>Daerah di Kabupaten Bungo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah - Vol. 4 No 1 	
4	<p>Cindy Arifani1 Dr. Agustinus Salle, SE., M.Ec2 Andika Rante, SE., M.SA (2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money - Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah - Volume 13, Nomor 1 	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan value for money, artinya semakin tinggi akuntabilitas, maka kinerja anggaran akan semakin tinggi. Sementara itu, transparansi mempengaruhi kinerja anggaran: pendekatan nilai uang, ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi kinerja anggaran. Pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan nilai untuk uang. Artinya dengan peningkatan pengawasan maka kinerja anggaran akan meningkat pula</p>
5	<p>Salsiya Peparung Gusti Herabudin Salamatul</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020 - JURNALKU - Volume 2 No.3 - 	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang belum optimal berdampak pada rendahnya akuntabilitas target program yang dilaksanakan. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memiliki permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal, yang kemudian berdampak pada akuntabilitas pelaksanaan target program tahun 2018-2020.</p>

6	Wahyuni Arifin*1, SaifulMuchlis2, Suhartono3 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information Sytem Sebagai Pemoderasi - Jurusan Akuntansi, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar - jurnal Islamic Accounting and Finance Review - Volume 1 Nomor 2 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan fairness berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan uji interaksil menunjukkan bahwa pemanfaatan accounting system mampu memoderasi hipotesis akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah, namun pemanfaatan accounting system tidak memoderasi fairness terhadap kinerja instansi pemerintah.</p>
7	1) Ismi Chandra 2) Siska Yulia Defitri 3) Rita Dwi Putri	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah - Jurnal Ekonomia - Vol 12, No. 1 - Program Studi Akuntansi, 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.</p>

		Universitas Mahaputra Muhammad Yamin	
8	Pardomuan Robinson Sihombing, Ade Marsinta Arsani (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah - Jurnal Ecodemica - Vol. 4 No. 2 	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa baik secara simultan maupun parsial Transparansi, Regional Laporan Keuangan Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya peningkatan di transparansi, laporan keuangan pemerintah daerah dan pendapatan daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah, khususnya di bidang anggaran transparansi, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah</p>
9	Fanny Jitmaul1, Lintje Kalangi2, Linda Lambey3	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong) - PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI, Fakultas 	<p>Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, yang secara langsung memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membangun daerahnya dan pelayanan yang lebih optimal kepada 280 masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dituntut adanya perubahan sistem nilai dan budaya kerja yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, pemerataan dan keadilan.</p>

		Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi	
10	Chintia Ayu Tamara , Yunus Tete Konde (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan - Vol. 1 (1) - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia. - http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/issue/view/55 	Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.
11	Mikael Edowai Herminawaty Abubakar Miah Said	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kaerah Deiyai - Halaman: 87-96 - Program Studi Manajemen 	penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Dengan kata lain semakin tinggi akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat pula. Kemudian dari hasil persamaan regresi atas transparansi dengan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai, dimana semakin transparansi pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat..

		<p>Program Pascasarjana Universitas Bosowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indonesian Journal of Business and Management 	
12	Lucy Auditya Husaini Lismawati	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah - Volume 3, Nomor 1 - Akuntansi Universitas Bengkulu - Jurnal Fairness 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Demikian pula, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah</p>
13	Zulkifli Umar ¹ , Cut Fittika Syawalina ² , Khairunnisa ³	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh - Vol.6, No.2 - Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 	<p>Hasil secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137.</p>

		<p>yah Aceh - KOLEGIAL</p>	
14	<p>Tania Febrianti¹, Indrawati Yuhertiana²</p>	<p>- Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Vol.14, No.1 - Universitas Pembangunan Nasional - JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS</p>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kota Surabaya memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dengan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran dan pengawasan yang dinilai baik.</p>
15	<p>Ifka Sri Ulina Br. Tondang¹, Gembira Marbun² (2022),</p>	<p>- Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang - Vol 1 No. 2 - Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas - Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pengelolaan dana desa aparatur, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Deli Serdang Daerah.</p>

2.3. Kerangka Berfikir

Percut Sei Tuan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Indonesia. Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sekarang ini terdiri dari dua Kerajaan Kecil yaitu Kejuruan Percut dan Kejuruan Sei Tuan yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan republik Indonesia. Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dollar Land”. Di masa Pemerintahan Republik Indonesia Kejuruan Percut dan kejuruan Sei Tuan digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat yang bernama Tengku M. Zaki Aufa, S.Sos, M.AP hingga sekarang memimpin Kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan.

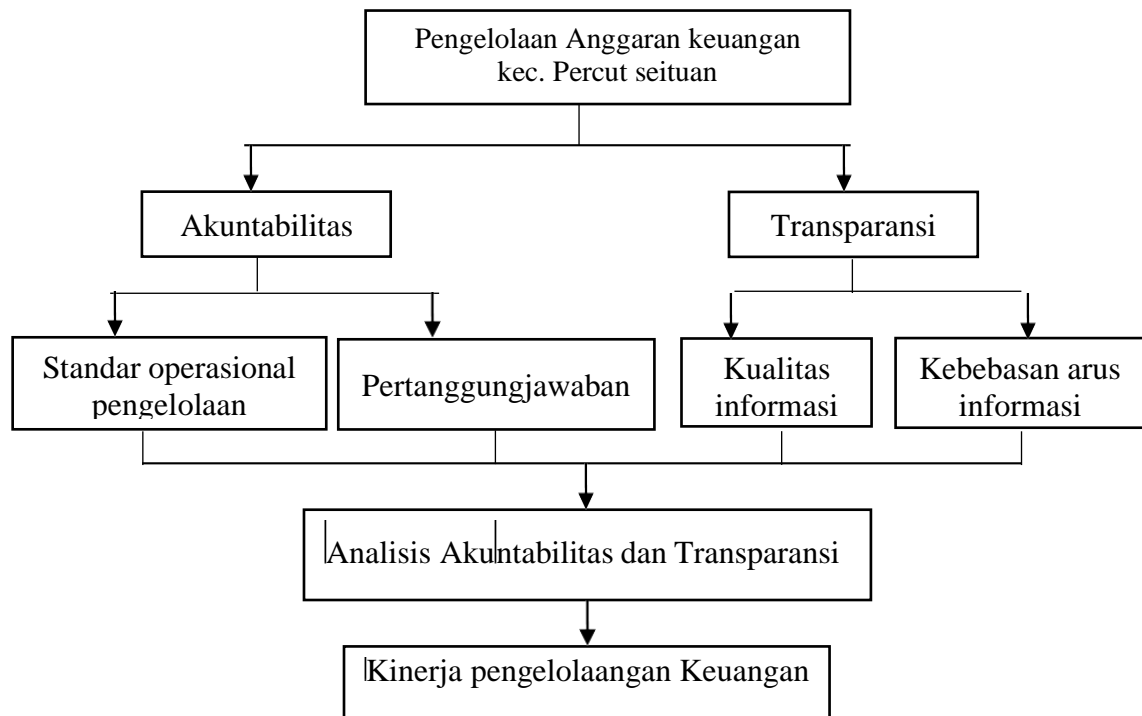
Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggarannya. Dalam hal ini pengelolaan anggaran yang efektif harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas kinerja adalah kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik ini diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang akan menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Dalam hal pelaksanaan akuntabilitas seharusnya dapat mengikuti standar-standar operasional pengelolaan anggaran yang telah

ditetapkan sehingga nantinya akan mampu mencapai tujuan yang direncanakan, selain itu dalam hal akuntabilitas anggaran seharusnya mampu dipertanggungjawabkan agar tidak menyimpang dari segala hal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya prinsip dalam pengelolaan anggaran yang baik yaitu transparansi, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam hal transparansi anggaran harus memiliki kualitas informasi pengelolaan anggaran yang baik serta memiliki kebebasan arus informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian teori di atas dapat dijelaskan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan sebenarnya. Menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel merupakan defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variable tersebut dapat diukur.

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Adapun indikator yang digunakan Standar operasional pengelolaan anggaran, dan Pertanggungjawaban atas kegiatan yang

dilakukan.

2. Transparansi

transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Adapun indikatornya adalah Kualitas informasi pengelolaan anggaran dan kebebasan arus informasi.

3. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan manajemen keuangan pribadi yang merupakan proses seorang individu memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun dan sistematis. Adapun indikator yang digunakan Penggunaan dana, penentuan sumber dana, manajemen resiko dan perencanaan masa depan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
3	Seminar Proposal													■	■	■	■				
4	Pengumpulan Data													■	■	■	■				
5	Analisis Data																	■	■	■	■
6	Menyusun Laporan																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan keadaan dari objek yang diteliti berdasarkan temuan-temuan yang dilakukan dalam penelitian, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, dimana sumber data primer merupakan sumber data langsung yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu :

- a) Dokumentasi, metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data

yang diperoleh dari dokumen, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

- b) Penyebaran angket wawancara, yaitu melakukan penyebaran angket berupa pertanyaan wawancara kepada narasumber.

Tabel 3.2. Daftar kisi-kisi wawancara

No	Kisi-kisi Wawancara	Item Pertanyaan
1	Akuntabilitas terkait dengan Penatausahaan	1,2,3
2	Akuntabilitas terkait dengan Pelaporan	3,4,5
3	Akuntabilitas terkait dengan Pertanggung jawaban	5,6,7
4	Transparansi terkait pengelolaan keuangan	8,9,10

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. (Ghozali, 2016) menyebutkan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis.

Berikut ini adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis kinerja pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.
2. Menganalisis penerapan akuntabilitas dalam peningkatan pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.
3. Menganalisis penerapan transparansi dalam peningkatan pengelolaan keuangan pada Kecamatan Percut Sei tuan.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

4.2.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Percut Sei Tuan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Indonesia. Populasi kota pada tahun 2001 adalah 17.863. Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sekarang ini terdiri dari dua Kerajaan Kecil yaitu Kejuruan Percut dan Kejuruan Sei Tuan yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan republik Indonesia. Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dollar Land”.

Di masa Pemerintahan Republik Indonesia Kejuruan Percut dan kejuruan Sei Tuan digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat yang bernama Tengku M. Zaki Aufa, S.Sos, M.AP hingga sekarang memimpin Kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kecamatan yang luasnya 17.079 km² (6.594 sq mi) yang terletak tepat di sebelah timur kota Medan, pada Sensus 2010 memiliki 384.672 jiwa, dan pada Sensus 2020 memiliki 402.468 jiwa, menjadikannya salah satu kabupaten terpadat di Indonesia. Ini terdiri dari dua puluh 'desa' (sebagian besar pinggiran kota Medan), yang tercantum di bawah ini dengan wilayah dan populasi mereka pada

Sensus 2010 dan Sensus 2020. Dua belas di antaranya adalah desa perkotaan dan delapan desa pedesaan. Ada sekitar 20 daftar Desa/kelurahan yang terletak di dalam kecamatan ini, di antaranya :

Tabel 4.1. Daftar Desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan

Nama	Area per km ²	Populasi Sensus 2010	Populasi Sensus 2020
Amplas	3.10	8,475	11,125
Bandar Kalippa	18.48	34,834	35,665
Kenangan	1.27	22,138	20,372
Sei Rotan	5.16	25,474	30,624
Sumber Rejo Timur (East Sumber Rejo)	4.16	24,937	28,328
Tembung	5.35	50,932	49,076
Bandar Khalipa	7.25	38,381	41,530
Medan Estate	6.90	15,440	12,123
Laut Dendang	1.70	15,054	15,048
Sampali	23.93	27,838	25,061
Bandar Setia	3.50	20,575	25,474
Kolam	5.98	14,561	17,679
Saentis	24.00	16,219	17,947
Cinta Rakyat	1.48	12,844	14,342
Cinta Damai	11.76	4,739	5,008
Pematang Lalang	20.10	1,456	1,497
Percut	10.63	13,440	14,640
Tanjung Rejo	19.00	9,338	10,273
Tanjung Selamat	16.33	5,259	5,470
Kenangan Baru	0.72	22,738	21,186

Objek pada penelitian ini adalah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjalankan Pengelolaan anggaran keuangan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui Bagaimana Pengelolaan anggaran di Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang belum Akuntabel dan Transparansi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Data tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran Keuangan pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

4.1.2. Pengelolaan Anggaran Keuangan Kecamatan Percut Sei Tuan

Pengelolaan Keuangan Kecamatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan Kecamatan harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun laporan realisasi anggaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Percut Sei Tuan

Keterangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Tingkat Efektifitas
Pendapatan Daerah	720.000.000	612.000.000	85,00%
Belanja Daerah	(10.213.339.618)	(9.142.256.413)	89,51%
Surplus/Defisit	(9.493.339.618)	(8.530.256.413)	89,85%
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Tingkat Efektifitas
Pendapatan Daerah	801.413.550	739.730.800	92,30%
Belanja Daerah	(12.330.314.563)	(11.628.091.216)	94,30%
Surplus/Defisit	(11.528.901.013)	(10.888.360.416)	94,44%
	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Tingkat Efektifitas
Pendapatan Daerah	840.000.000	703.000.000	83,09%
Belanja Daerah	(14.392.514.380)	(11.317.127.472)	78,63%
Surplus/Defisit	(13.552.514.380)	(10.614.119.252)	78,32%

Sumber : LRA Kecamatan (2023)

Berdasarkan data yang di dilihat bahwasannya tingkat efektifitas

pendapatan daerah dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan berada pada nilai 83,09%, tingkat efektifitas tersebut masih termasuk efektif namun pada seluruh tahun anggaran terjadi defisit anggaran yang terlalu besar karena belanja daerah lebih tinggi dari pendapatannya. Hal ini menunjukkan fenomena terkait dengan tingkat partisipatif yang rendah pada kinerja pengelolaan keuangan kecamatan percut sei tuan.

Jika beracuan kepada konsep *sharite enterprise theory* apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang guna melaksanakan amanah dari pengelolaan dan penggunaan anggaran kecamatan. kecamatan memprioritaskan penggunaan, anggaran untuk melakukan pembangunan yang tepat dan guna sasaran sehingga bisa bermanfaat banyak bagi warga kecamatan.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan persiapan generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya. Namun jika dilihat dari pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa dikritis masih dirasa kurang dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih memerlukan perbaikan, dan melibatkan, masyarakat desa yang perluas lagi cakupannya.

4.1.3. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan Percut Sei Tuan

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kecamatan Percut Sei Tuan, digunakan dua indikator yaitu standar operasional pengelolaan anggaran dan pertanggung jawaban.

4.1.3.1 Penerapan Akuntabilitas dengan Indikator Standar Operasional pengelolaan anggaran

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak kecamatan terkait dengan kesesuaian akuntabilitas menurut Permendagri 113 tahun 2014 dengan yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian ini menggunakan indikator standar operasional pengelolaan anggaran yaitu penatausahaan dan pelaporan, kemudian indikator pertanggungjawaban. Adapun hasil dari indikator standar operasional pengelolaan anggaran yaitu penatausahaan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Akuntabilitas terkait dengan Penatausahaan

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kecamatan	Penatausahaan di Kecamatan Percut Sei Tuan telah dilakukan oleh Bendahara Kecamatan	S
2. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kecamatan Bendahara Kecamatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.		
3. Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S

Sumber : Hasil Wawancara Perangkat Kecamatan (2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada indikator tentang Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kecamatan, pihak kecamatan menjawab bahwa Penatausahaan di Kecamatan Percut Sei Tuan telah dilakukan oleh Bendahara Kecamatan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator pertama sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator tentang Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kecamatan Bendahara Kecamatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, pihak kecamatan menjawab bahwa Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib., dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator kedua sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator tentang Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, pihak kecamatan menjawab bahwa Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator ketiga sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berikut adalah hasil penyebaran kuesioner dari indikator standar operasional pengelolaan keuangan dari pelaporan :

Tabel 4.3. Akuntabilitas terkait dengan Pelaporan

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1.Camat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan Camat kepada Bupati	S
2.Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Keuangan Kecamatan	Laporan Realisasi semester pertama berupa laporan Keuangan Kecamatan.	S
3.Laporan realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui camat pada bulan September	TS

Sumber : Hasil Wawancara Perangkat Kecamatan (2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada indikator tentang Camat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, pihak kecamatan menjawab bahwa Laporan semester pertama dilaporkan Camat kepada Bupati, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator pertama sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator pada indikator tentang Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Keuangan Kecamatan, pihak kecamatan

menjawab bahwa Laporan Realisasi semester pertama berupa laporan Keuangan Kecamatan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator kedua sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kemudian pada indikator tentang Laporan realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, pihak kecamatan menjawab bahwa Laporan Semester I dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Camat pada bulan September, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator ketiga sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.1.3.2 Penerapan Akuntabilitas dengan Indikator Pertanggungjawaban

Berikut adalah hasil penyebaran kuesioner dari indikator standar operasional pengelolaan keuangan dari pertanggungjawaban :

Tabel 4.4. Akuntabilitas terkait dengan Pertanggung Jawaban

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1.Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Camat sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
2.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S

3.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan kecamatan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan kecamatan.	S
---	--	----------

Sumber : Hasil Wawancara Perangkat Kecamatan (2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada indikator tentang Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, pihak kecamatan menjawab bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator kedua sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, pihak kecamatan menjawab bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator kedua sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan kecamatan, pihak kecamatan menjawab bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan kecamatan, belanja, dan pembiayaan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator ketiga sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.1.4. Penerapan Transparansi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Percut Sei

Tuan

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak kecamatan terkait dengan kesesuaian transparansi menurut Permendagri 113 tahun 2014 dengan yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan indikator terkait kualitas informasi dan kebebasan arus informasi adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.4. Transparansi terkait dengan Kualitas Informasi dan Kebebasan Arus Informasi

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1.Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	TS
2.Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.	TS
3.Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan keuangan kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekcam Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan keuangan kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota	S

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada indikator tentang Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, pihak kecamatan menjawab bahwa Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator pertama sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator tentang Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, pihak kecamatan menjawab bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator kedua sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian pada indikator tentang Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan keuangan kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota, pihak kecamatan menjawab bahwa Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekcam Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan keuangan kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator ketiga sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

4.2. Pembahasan

4.2.1 Penerapan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan keuangan dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan terhadap Laporan Realisasi anggaran keuangan, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Kecamatan terhadap pengelolaan Anggaran keuangan yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Kecamatan Percut Sei Tuan mengalami keterlambatan dalam pelaporannya yaitu pada bulan September.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi anggaran adalah pertanggungjawaban Pemerintahan kecamatan terhadap pengelolaan Anggaran keuangan secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala

aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran keuangan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fajar, 2020). Sementara itu menurut (Garung & Ga, 2020) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan indikator akuntabilitas terkait dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwasannya dari 9 indikator terdapat 8 indikator yang sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, sementara itu pada indikator akuntabilitas terkait dengan pelaporan dengan pernyataan bahwa laporan realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan sementara yang terjadi Laporan Semester I dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Camat pada bulan September, ini tidak sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sehingga berada dalam kategori tidak sesuai.

4.2.2 Penerapan Transparansi dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan

Menurut (Garung & Ga, 2020) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu

(Ramadhani, 2021) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman et al., 2016). Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. (Mardiasmo et al., 2008) menyatakan manfaat transparansi yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan integritas suatu organisasi dan dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna informasi.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

Berdasarkan indikator transparansi terkait dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwasannya dari 3 indikator terdapat 1 indikator yang sesuai dan 2 indikator yang tidak sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Adapun 2 indikator yang tidak sesuai yaitu pada inidikator transparansi terkait dengan Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan. Kemudian terkait Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan Keuangan

Kecamatan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang terjadi bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Keuangan Kecamatan belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4.2.3 Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Percut Sei Tuan

Pengelolaan Keuangan Kecamatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan Kecamatan harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berkaitan dengan ini pengelolaan anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dikelola dengan penuh tanggungjawab oleh setiap desa yang menerimannya untuk mewujudkan keadilan social yang berujung pada kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan segenap bangsa Indonesia.

Dalam konsep *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akuntabilitas terkait dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwasannya telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.
2. Penerapan transparansi terkait dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwasannya belum sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.
3. Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan pada kecamatan percut sei tuan masih cukup efektif terjadi defisit anggaran yang terlalu besar karena belanja daerah lebih tinggi dari pendapatannya

5.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kecamatan, diharapkan untuk memperhatikan dan meningkatkan hal-hal dalam pengelolaan keuangan kecamatan dengan melakukan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel-variabel independen lain serta menambah sampel penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi sehingga perlu dilakukan penambahan variabel dalam penelitian.
2. Proses penyebaran angket wawancara masih dalam waktu yang terbatas sehingga belum maksimal dalam hasil wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2014). Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah. Halaman*, 1(2), 387–409.
- Damin, M., & Mustaqim, F. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi. *ENTRIES*, 3(2), 276–288.
- Fajar Panuluh, G. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. 2(1), 10–20.
- Fathah, R. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2), 2030.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Ghozali, I. (2016). *pplikasi Analisis Multivarite*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A., Pirari, W. S., & Sari, M. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 23–35. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i2.1196>
- Harjono, I., & Zulkarnaen, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki*. 3(2), 61–69.
- Ida, I., & Dwinta, C. Y. (2010). Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(3), 131–144.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)* (pp. 15–70). Syiah Kuala University.

- Lestari, D. D. A., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalan Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(9), 19–29.
- Lombo, F. A., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2022). Transparansi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *GOVERNANCE*, 2(2), 15–40.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*, 30–60.
- Pulungan, D. R. (2017). Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 56–61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1180>
- Putri, N. A., & Lestari, D. (2019). Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i1.61>
- Rahman, M. A., Suwandi, M., & Hamid, A. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 3(2), 16–32.
- Ramadhani, S. W. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus: Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur). *Proaksi*, 8(2), 561–571.
- Silaban, D. E., Sari, E. N., & Astuti, W. (2022). Peranan Auditor Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Good Governance Serta Dampaknya Pada Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1100–1114.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 20–23.

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.

Warsono, W. (2010). *Prinsip-Prinsip Dan Praktik Keuangan Pribadi*. Rajawail Pers.

Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 15–60. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>